



STATISTIK KEUANGAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

2
0
1
8



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**



**STATISTIK KEUANGAN DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**2
0
1
8**

STATISTIK KEUANGAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 2018

ISBN : 2656-2545
Nomor Publikasi : 62000.1904
Katalog : 7203007.62
Ukuran Buku : 15 x 21 cm
Jumlah Halaman : xiv + 64 halaman

Naskah:

Bidang Statistik Distribusi

Infografis:

Bidang Statistik Distribusi

Gambar Kulit:

Bidang Statistik Distribusi

Penyunting:

Bidang Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik

Tata Letak:

Bidang Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik

Diterbitkan Oleh:

© Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah

Dicetak Oleh:

CV. APP Digital Printing

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh buku ini untuk tujuan komersil tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik.

TIM PENYUSUN

Penanggung Jawab Umum : Yomin Tofri
Koordinator Teknis : Bambang Supriono
Penyusun Naskah : Eka Restuti Fajarina
Penyunting Naskah : Ryan Hawari

Perwajahan

Koordinator : Muhammmad Said
Tata Letak : Thosan Girisona Suganda
Gambar Kulit : Ryan Hawari
Infografis : Ryan Hawari
Yunita Kristy
Penyunting : Alfina Fasriani

Kata Pengantar

Publikasi Statistik Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah 2018 merupakan publikasi tahunan, yang diterbitkan secara berkala oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Tengah. Secara garis besar, publikasi ini berisi data statistik keuangan pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah. Sumber data statistik keuangan daerah ini berasal dari data sekunder, yang diperoleh berdasarkan realisasi pendapatan dan belanja secara agregat selama periode tahun 2018.

Kritik dan saran yang bersifat konstruktif, sangat diharapkan guna penyempurnaan publikasi ini di masa mendatang. Ucapan terima kasih dan apresiasi yang tinggi, disampaikan kepada semua pihak yang telah berpartisipasi sehingga publikasi ini dapat terbit tepat waktu.

Palangka Raya, Desember 2019

BPS Provinsi Kalimantan Tengah

Kepala,



Yomin Tofri, M.A.



Daftar Isi

Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	v
Daftar Grafik	vii
Daftar Lampiran	ix
Bab I Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang	3
1.2 Tujuan	4
1.3 Ruang Lingkup dan Metode Pengumpulan Data	4
1.4 Konsep dan Definisi	5
BAB II Ulasan Ringkas	19
2.1 Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah Provinsi	21
2.2 Realisasi Pengeluaran Pemerintah Daerah Provinsi	23
2.3 Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	25
2.4 Realisasi Pengeluaran Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	28
Lampiran	31



Daftar Tabel

Tabel 2.1	Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi (Ribu Rupiah), 2017-2018 ...	22
Tabel 2.2	Realisasi Belanja Daerah Provinsi (Ribu Rupiah), 2017-2018	23
Tabel 2.3	Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten/Kota (Ribu Rupiah), 2017-2018	26
Tabel 2.4	Realisasi Belanja Daerah Kabupaten/Kota (Ribu Rupiah), 2017-2018.....	29

<https://kalteng.bps.go.id>

Daftar Grafik

Grafik 2.1 Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi, 2014-2018 (Triliun Rupiah).....	21
Grafik 2.2 Realisasi Belanja Daerah Provinsi, 2014-2018 (Triliun Rupiah).....	24
Grafik 2.3 Komposisi Realisasi Belanja Daerah Provinsi, 2014-2018 (Triliun Rupiah).....	25
Grafik 2.4 Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten/Kota, 2014-2018 (Triliun Rupiah).....	27
Grafik 2.5 Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut Kabupaten/Kota, 2018 (Miliar Rupiah).....	28
Grafik 2.6 Realisasi Belanja Daerah Kabupaten/Kota 2018 (Miliar Rupiah).....	30

Daftar Lampiran

Lampiran 1. Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Ribu Rupiah), 2017-2018	33
Lampiran 2. Realisasi Belanja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Ribu Rupiah), 2017-2018.....	34
Lampiran 3. Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Seluruh Provinsi Kalimantan Tengah (Ribu Rupiah), 2017-2018.....	35
Lampiran 4. Realisasi Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Seluruh Provinsi Kalimantan Tengah (Ribu Rupiah), 2017-2018.....	36
Lampiran 5. Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Ribu Rupiah), 2017-2018	37
Lampiran 6. Realisasi Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Ribu Rupiah), 2017-2018.....	38
Lampiran 7. Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Ribu Rupiah), 2017-2018	39
Lampiran 8. Realisasi Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Ribu Rupiah), 2017-2018.....	40
Lampiran 9. Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas (Ribu Rupiah), 2017-2018.....	41
Lampiran 10. Realisasi Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas (Ribu Rupiah), 2017-2018.....	42
Lampiran 11. Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan (Ribu Rupiah), 2017-2018.....	43
Lampiran 12. Realisasi Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan (Ribu Rupiah), 2017-2018.....	44
Lampiran 13. Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Utara (Ribu Rupiah), 2017-2018.....	45
Lampiran 14. Realisasi Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Utara (Ribu Rupiah), 2017-2018.....	46
Lampiran 15. Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukamara (Ribu Rupiah), 2017-2018.....	47
Lampiran 16. Realisasi Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Sukamara (Ribu Rupiah), 2017-2018.....	48
Lampiran 17. Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau (Ribu Rupiah), 2017-2018.....	49

Lampiran 18. Realisasi Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau (Ribu Rupiah), 2017-2018.....	50
Lampiran 19. Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Seruyan (Ribu Rupiah), 2017-2018.....	51
Lampiran 20. Realisasi Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Seruyan (Ribu Rupiah), 2017-2018.....	52
Lampiran 21. Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan (Ribu Rupiah), 2017-2018.....	53
Lampiran 22. Realisasi Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan (Ribu Rupiah), 2017-2018.....	54
Lampiran 23. Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Pulang Pisau (Ribu Rupiah), 2017-2018.....	55
Lampiran 24. Realisasi Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Pulang Pisau (Ribu Rupiah), 2017-2018.....	56
Lampiran 25. Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas (Ribu Rupiah), 2017-2018.....	57
Lampiran 26. Realisasi Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas (Ribu Rupiah), 2017-2018.....	58
Lampiran 27. Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Timur (Ribu Rupiah), 2017-2018.....	59
Lampiran 28. Realisasi Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Timur (Ribu Rupiah), 2017-2018.....	60
Lampiran 29. Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Murung Raya (Ribu Rupiah), 2017-2018.....	61
Lampiran 30. Realisasi Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Murung Raya (Ribu Rupiah), 2017-2018.....	62
Lampiran 31. Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya (Ribu Rupiah), 2017-2018.....	63
Lampiran 32. Realisasi Belanja Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya (Ribu Rupiah), 2017-2018.....	64

1

PENDAHULUAN

Pendapatan dan Pengeluaran Daerah
Provinsi Kalimantan Tengah, 2018

2018
Rp 4,68 Triliun

2019
Rp 4,10 Triliun

2018
Rp 4,55 Triliun

2019
Rp 3,69 Triliun



Pendapatan

Dana Perimbangan

Rp 2,91 Triliun
Rupiah

62,11%

PAD

Rp 1,61 Triliun
Rupiah

34,53%

Lain-lain

Rp 0,61 Triliun
Rupiah

3,36%



Belanja

52,22%

Tidak Langsung

Rp 2,38 Triliun
Rupiah

47,78%

Langsung

Rp 2,17 Triliun
Rupiah

Pendapatan

Rp 4.682
Miliar

Pengeluaran

Rp 4.548
Miliar

SiLPA

Rp 134
Miliar

BAB I

Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Dalam hal pembiayaan pembangunan pemerintah daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan sebuah instrumen penting. Secara esensial, postur APBD menggambarkan kapabilitas sumber dana yang tersedia. Besarnya sumber anggaran pembiayaan menentukan skala prioritas terhadap aplikasi kebijakan selama tahun anggaran. Untuk pengembangan infrastruktur dan layanan masyarakat yang berkualitas, efisiensi dalam menggunakan anggaran, efektivitas program kerja, dan akuntabilitas kinerja pengelolaan anggaran selalu menjadi perhatian publik. Oleh karenanya, diperlukan transparansi tatakelola keuangan pemerintah daerah yang akuntabel dari waktu ke waktu.

Berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 (tentang Otonomi Daerah) dan No. 25 Tahun 1999 (tentang Perimbangan Keuangan), yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 (tentang Pemerintah Daerah) dan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 (tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah), maka pemerintah daerah memiliki wewenang untuk menentukan arah pembangunan secara lebih mandiri. Landasan hukum ini diharapkan dapat menjamin kualitas pembangunan yang lebih representatif bagi kebutuhan masyarakat. Sehingga, pemerintah daerah perlu didorong agar mampu mewujudkan otonomi daerah secara

akuntabel. Realisasi penerimaan sebagai pendapatan dan pengeluaran belanja daerah, harus mampu merefleksikan tingginya tingkat tanggung jawab birokrasi terhadap tujuan pembangunan masyarakat secara berkesinambungan.

1.2 Tujuan

Secara garis besar, publikasi Statistik Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah 2018 ini memberikan informasi mengenai :

- a. Realisasi penggunaan anggaran pendapatan dan belanja pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota.
- b. Potensi sumber dana daerah dan peranannya terhadap pembangunan daerah selama tahun anggaran.
- c. Sebagai salah satu indikator kinerja pembangunan daerah selama tahun anggaran.

1.3 Ruang Lingkup dan Metode Pengumpulan Data

Kompilasi data anggaran serta realisasi pendapatan dan belanja pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah diperoleh dari hasil pencacahan Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dengan menggunakan Daftar APBD-1 dan Daftar K-1. Sumber data diperoleh dari Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Kompilasi data anggaran dan realisasi pendapatan dan belanja pemerintah kabupaten/kota diperoleh dari Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota se-Provinsi Kalimantan Tengah dan hasil pencacahannya dicatat dengan menggunakan Daftar APBD-2 dan Daftar K-2.

1.4 Konsep dan Definisi

Bagian ini berisi konsep dan definisi operasional dari beberapa istilah yang digunakan dalam Publikasi Statistik Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah 2018. Konsep tersebut mengacu pada istilah yang berkaitan dengan kegiatan keuangan pemerintah daerah, baik dari sisi pendapatan maupun sisi pengeluaran.

Realisasi Pendapatan dan Pengeluaran Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota adalah realisasi atau perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada tahun anggaran.

A. Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah terdiri dari :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
2. Dana Perimbangan
3. Lain-Lain Pendapatan yang Sah

A.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, guna keperluan daerah yang bersangkutan dalam membiayai kegiatannya. PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

A.1.1. Pajak Daerah adalah pungutan yang dilakukan pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang

berlaku. Pajak daerah ini dapat dibedakan dalam dua kategori, yaitu pajak daerah yang ditetapkan oleh peraturan daerah dan pajak negara yang pengelolaannya dan penggunaannya diserahkan kepada daerah. Penerimaan pajak daerah antara lain pajak hotel, restoran, reklame, penerangan jalan, galian golongan C, pajak bumi dan bangunan, bea perolehan hak atas tanah serta bangunan, dan lain-lain.

A.1.2. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah yang dilakukan sehubungan dengan suatu jasa atau fasilitas yang diberikan oleh Pemerintah Daerah secara langsung dan nyata kepada pembayar. Retribusi daerah antara lain retribusi pelayanan kesehatan, pengujian kendaraan bermotor, pemeriksaan alat pemadam kebakaran, penggantian biaya cetak peta, pelayanan pendidikan, pemakaian kekayaan daerah, pasar grosir dan/atau pertokoan, terminal, rumah potong hewan, tempat rekreasi/olahraga, izin mendirikan bangunan, izin peruntukan penggunaan tanah, izin trayek, dan lain-lain.

A.1.3. Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan adalah penerimaan yang berupa hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, yang terdiri atas bagian laba lembaga keuangan bank, bagian laba lembaga keuangan non



bank, bagian laba perusahaan milik daerah lainnya, dan bagian laba atas penyertaan modal/investasi kepada pihak ketiga.

A.1.4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah adalah pendapatan daerah yang **meliputi** hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dapat dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, dan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat penjualan dan atau pengadaan barang dan atau jasa oleh daerah.

A.2. Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Perimbangan terdiri dari bagi hasil pajak/bukan pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

A.2.1. Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak

Bagi Hasil Pajak terdiri atas penerimaan pajak bumi dan bangunan (PBB), penerimaan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), pajak penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri, dan PPh Pasal 21 orang pribadi, dan lain-lain. Bagi Hasil Bukan Pajak terdiri atas iuran hak pengusahaan hutan (IHPH), provisi sumber dayahutan (PSDH), pemberian hak atas tanah negara, *landrent*, iuran eksplorasi/eksploitasi/royalti, pungutan pengusaha perikanan

dan hasil perikanan, hasil pertambangan minyak bumi/gas alam, dan lain-lain.

A.2.2. Dana Alokasi Umum (DAU) adalah transfer dana dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang dimaksudkan untuk menutup kesenjangan fiskal (*fiscal gap*) dan pemerataan kemampuan fiskal antar daerah dalam rangka membantu kemandirian pemerintah daerah menjalankan fungsi dan tugasnya melayani masyarakat.

A.2.3. Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang disediakan kepada daerah untuk memenuhi kebutuhan khusus. Ada tiga kriteria dari kebutuhan khusus seperti ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:

1. Kebutuhan tidak dapat diperhitungkan dengan menggunakan rumus dana alokasi umum.
2. Kebutuhan merupakan komitmen atau prioritas nasional
3. Kebutuhan untuk membiayai kegiatan reboisasi dan penghijauan oleh daerah penghasil.

Dengan demikian DAK pada dasarnya merupakan transfer yang bersifat spesifik untuk tujuan-tujuan yang sudah digariskan.

A.3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah adalah pendapatan lainnya dari pemerintah pusat dan atau dari instansi pusat, serta dari daerah lainnya. Lain-lain pendapatan yang sah mencakup pendapatan hibah, dana darurat yang merupakan dana dari



APBN yang dialokasikan kepada daerah yang mengalami bencana nasional, peristiwa luar biasa dan atau krisis solvabilitas, dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya, dana penyesuaian dan otonomi khusus dari pemerintah, bantuan keuangan dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya, dan pendapatan yang sah lainnya.

B. Belanja Daerah

Belanja Daerah terdiri dari :

1. Belanja Tidak Langsung
2. Belanja Langsung

B.1. Belanja Tidak Langsung adalah belanja yang tidak terkait langsung dengan kegiatan yang dilaksanakan dan sulit diukur dengan capaian prestasi kerja yang ditetapkan. Belanja tidak langsung mencakup belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga.

B.1.1. Belanja Pegawai Tidak Langsung adalah belanja kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Termasuk disini adalah uang representasi dan tunjangan pimpinan dan anggota DPRD, gaji dan tunjangan kepala daerah dan wakil kepala daerah, serta penghasilan dan penerimaan lainnya yang



ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dianggarkan dalam belanja pegawai.

B.1.2. Belanja Bunga adalah belanja yang digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung berdasarkan kewajiban pokok utang (*principal outstanding*) dan berdasarkan perjanjian jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.

B.1.3. Belanja Subsidi adalah belanja yang telah dianggarkan dan digunakan untuk **bantuan** biaya produksi kepada perusahaan/ lembaga tertentu, agar harga jual produksi barang/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak. Tentunya perusahaan/ lembaga tersebut menghasilkan produk atau jasa untuk pelayanan masyarakat umum.

B.1.4. Belanja Hibah adalah belanja yang telah dianggarkan untuk diberikan kepada pihak lain sebagai hibah dalam bentuk uang, barang dan atau jasa. Hibah dapat diberikan kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, pemerintah desa, perusahaan daerah/BUMN/BUMD, badan/ lembaga/ organisasi swasta, ataupun kelompok masyarakat/ perorangan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.

B.1.5. Belanja Bantuan Sosial adalah belanja yang telah dianggarkan untuk memberikan bantuan dalam bentuk uang dan atau

barang kepada organisasi kemasyarakatan, partai politik, dan yang lainnya dengan tujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

B.1.5.1. Belanja Sosial Organisasi Kemasyarakatan adalah pemberian bantuan kepada organisasi kemasyarakatan untuk tujuan sosial, yang dilakukan secara selektif dan mempunyai kejelasan dalam penggunaannya.

B.1.5.2. Belanja Partai Politik adalah pemberian bantuan kepada partai politik yang dianggarkan dengan ketentuan perundang-undangan sebagai bantuan sosial.

B.1.6. Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa adalah belanja yang telah dianggarkan sebagai dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota, kepala desa, atau pendapatan pemerintah daerah tertentu yang diberikan kepada pemerintah daerah lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Belanja bagi hasil terdiri atas:

1. Belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah provinsi
2. Belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah kabupaten/kota
3. Belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah desa
4. Belanja bagi hasil retribusi daerah kepada pemerintah kabupaten/kota



5. Belanja bagi hasil retribusi daerah kepada pemerintah desa

B.1.7. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/

Kota dan Pemerintah Desa adalah pemberian bantuan yang bersifat umum atau khusus dari pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota, atau pemerintah desa, atau pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan atau peningkatan kemampuan keuangan. Bantuan keuangan yang bersifat umum, peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah/pemerintah desa penerima bantuan. Bantuan keuangan yang bersifat khusus peruntukan dan pengelolaannya diarahkan/ditetapkan oleh pemerintah daerah pemberi bantuan. Bantuan keuangan terdiri atas:

1. Bantuan keuangan kepada pemerintah provinsi
2. Bantuan keuangan kepada pemerintah kabupaten/kota
3. Bantuan keuangan kepada pemerintah desa
4. Bantuan keuangan kepada pemerintah daerah/pemerintah desa lainnya

B.1.8. Belanja Tidak Terduga adalah belanja untuk kegiatan yang

sifatnya **tidak** biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas

kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.

B.2. Belanja Langsung adalah belanja yang terkait langsung dengan pelaksanaan kegiatan dan **dapat** diukur dengan capaian prestasi kerja yang telah ditetapkan. Belanja langsung mencakup belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal.

B.2.1. Belanja Pegawai Langsung adalah pengeluaran untuk honorarium/upah, lembur dan pengeluaran lain untuk meningkatkan kualitas pegawai dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah.

B.2.2. Belanja Barang dan Jasa adalah pengeluaran yang digunakan untuk **pembelian**/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari setahun, dan atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah. Pembelian/pengadaan barang dan jasa yang dimaksud meliputi bahan pakai habis, bahan/material, jasa kantor, premi asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak dan penggandaan, sewa gedung, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atribut, pakaian kerja, pakaian khusus hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan pindah tugas, pemulangan pegawai, dan lainnya.

B.2.3. Belanja Modal adalah pengeluaran yang digunakan untuk pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang nilai manfaatnya lebih dari setahun. Pembentukan aset tersebut meliputi pengadaan tanah, alat-alat berat, alat-alat angkutan, alat-alat bengkel, alat-alat pertanian, peralatan dan perlengkapan kantor, komputer, meubelair, peralatan dapur, penghias ruangan, alat-alat studio, alat-alat komunikasi, alat-alat ukur, alat-alat kedokteran, alat-alat laboratorium, konstruksi jalan, jembatan, jaringan air, penerangan jalan, taman dan hutan kota, instalasi listrik dan telepon, bangunan, buku/kepuustakaan, barang seni, pengadaan hewan/ternak dan tanaman, serta persenjataan/ keamanan.

C. Pembiayaan Daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan neto merupakan selisih antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan. Jumlah pembiayaan neto harus dapat menutup defisit anggaran, sebaiknya surplus anggaran akan dialokasikan dalam pengeluaran pembiayaan, baik untuk pembayaran pokok hutang, maupun untuk investasi atau pembentukan dana cadangan. Pembiayaan daerah terdiri atas

penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah.

C.1. Penerimaan Pembiayaan Daerah adalah sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, dan penerimaan kembali pemberian pinjaman.

C.1.1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu adalah selisih lebih dari surplus/defisit ditambah dengan pos penerimaan pembiayaan dikurangi dengan pos pengeluaran pembiayaan, pada periode anggaran tahun yang lalu.

C.1.2. Pencairan Dana Cadangan adalah penerimaan daerah yang diperoleh dari pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke rekening kas umum daerah dalam tahun anggaran berkenaan.

C.1.3. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan adalah semua penjualan aset milik pemerintah daerah yang dikerjasamakan oleh pihak ketiga, atau hasil divestasi penyertaan modal pemerintah daerah.

C.1.4. Penerimaan Pinjaman Daerah adalah semua penerimaan dari pinjaman daerah, termasuk penerimaan atas penerbitan

obligasi daerah yang akan direalisasikan pada tahun anggaran berjalan.

C.1.5. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman adalah semua penerimaan kembali dari pemberian pinjaman kepada pemerintah pusat dan atau pemerintah daerah lainnya.

C.1.6. Penerimaan Piutang Daerah adalah semua penerimaan yang berasal dari pemberian piutang daerah kepada pemerintah yang lebih tinggi maupun lebih rendah serta swasta.

C.1.7. Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir adalah semua penerimaan kembali yang berasal dari investasi dana yang dipinjamkan untuk dikelola dan digulirkan kepada masyarakat oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Anggaran yang bertujuan meningkatkan ekonomi rakyat dan tujuan lainnya.

C.2. Pengeluaran Pembiayaan Daerah adalah pembentukan dana cadangan, penyertaan modal, pembayaran utang pokok yang jatuh tempo, dan sisa lebih perhitungan anggaran tahun berjalan.

C.2.1. Pembentukan Dana Cadangan adalah pengeluaran untuk membentuk dana cadangan guna mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus/sepenuhnya diberikan dalam satu tahun anggaran.

C.2.2. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah adalah **pengeluaran** daerah yang dialokasikan pada penyertaan modal/investasi pemerintah daerah, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, permanen atau non permanen. Investasi ini dapat berupa deposito berjangka, pembelian Surat Utang Negara (SUN), Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Surat Perbendaharaan Negara (SPN), saham, penanaman modal pada BUMN/BUMD, pembelian obligasi dan surat utang jangka panjang.

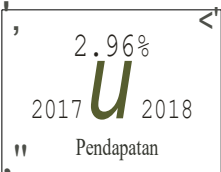
C.2.3. Pembayaran Pokok Utang adalah pembayaran kewajiban atas pokok utang yang dihitung berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.

C.2.4. Pemberian Pinjaman Daerah adalah pengeluaran pemerintah daerah untuk pemberian pinjaman kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan atau pihak ketiga.

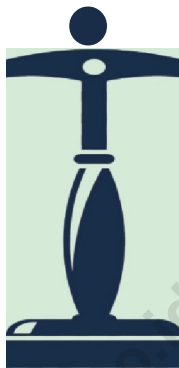
C.3. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan digunakan untuk mengetahui pembiayaan neto, yang merupakan selisih antara penerimaan pembiayaan dikurangi dengan dengan pengeluaran pembiayaan.

ULASAN RINGKAS

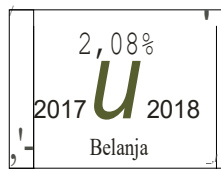
Pendapatan dan Pengeluaran Daerah Kabupaten/Kota se-Provinsi Kalimantan Tengah, 2018



Rp15,95 Triliun



Rp15,88 Triliun



Dana Perimbangan
76,60%

Belanja Tidak Langsung *JiJ.*
51,43%

TAHUKAH ANDA?



Kabupaten
Kotawaringin Timur *{ff}*

PAD Tertinggi
12,15%



Paling Mandiri

Kabupaten
Kapas



Belanja Modal Tertinggi
24,54%



Prioritas
Pembangunan
Infra struktur

Pendapatan

Rp 15,95
Triliun

Pengeluaran

Rp 15,88
Triliun

SILPA

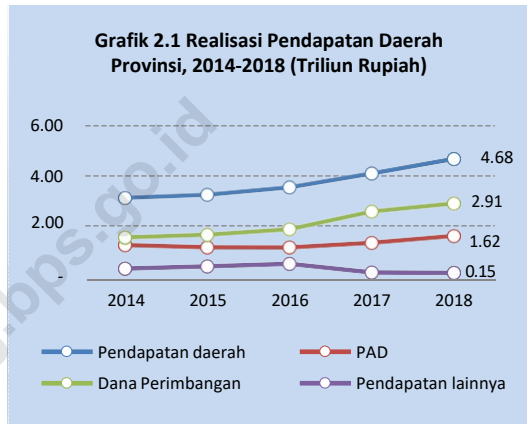
Rp 0,07
Triliun

BAB II

Ulasan Ringkas

2.1 Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah Provinsi

Realisasi pendapatan pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Tengah mengalami kenaikan secara konsisten selama lima tahun terakhir, dengan rata-rata pendapatan sekitar Rp3,74 triliun per tahun. Selama tahun 2018, pendapatan tercatat Rp4,68 triliun atau meningkat 14,17 persen dibandingkan tahun lalu yang senilai Rp4,10 triliun. Dengan meningkatnya pendapatan daerah, diharapkan dapat



membuka ruang yang luas bagi pemerintah daerah untuk merancang sebuah strategi baru yang bersifat konstruktif. Hal ini penting untuk mengurangi tingkat ketergantungan selama ini.

Pendapatan daerah terdiri dari dana perimbangan (Rp2,91 triliun), Pendapatan Asli Daerah–PAD (Rp1,62 triliun), dan pendapatan lainnya (Rp0,15 triliun). Struktur APBD tahun 2018 relatif masih didominasi oleh tingginya dana perimbangan (62,11 persen), lebih rendah dibandingkan tahun 2017 (63,18 persen). Terjadi kenaikan kontribusi PAD dari 32,73 persen (2017) menjadi 34,53 persen (2018).

**Tabel 2.1 Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi (Ribu Rupiah),
2017-2018**

Jenis Pendapatan	2017	2018	Perubahan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
A. PENDAPATAN DAERAH	4 100 957 755	4 682 054 876	14,17
1. Pendapatan Asli Daerah	1 342 330 619	1 616 521 660	20,43
1.1. Pajak Daerah	1 091 749 859	1 354 700 324	24,09
1.2. Retribusi Daerah	11 521 594	12 549 086	8,92
1.3. Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	54 057 991	64 096 645	18,57
1.4. Lain-lain PAD yang Sah	185 001 175	185 175 605	0,09
2. Dana Perimbangan	2 590 877 895	2 907 967 886	12,24
2.1. Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	372 437 952	582 760 139	56,47
2.2. Dana Alokasi Umum	1 574 382 856	1 574 382 856	0,00
2.3. Dana Alokasi Khusus	644 057 087	750 824 891	16,58
3. Lain-lain Pendapatan yang Sah	167 749 241	157 565 330	-6,07

Penerimaan PAD meningkat sekitar 20,43 persen dari Rp1,34 triliun (2017) menjadi Rp1,62 triliun (2018). Kontribusi PAD didominasi oleh penerimaan pajak daerah (83,80 persen) dan lain-lain PAD yang sah (11,46 persen). Penerimaan dana perimbangan juga terjadi kenaikan sebesar 12,24 persen dari Rp2,59 triliun (2017) menjadi Rp2,91 triliun (2018). Kontribusi dana perimbangan terutama berasal dari Dana Alokasi Umum–DAU (54,14 persen), Dana Alokasi Khusus–DAK (25,82 persen), dan dana bagi hasil pajak/bukan pajak (20,04 persen). Meningkatnya kontribusi PAD diharapkan mampu mereduksi masih tingginya tingkat ketergantungan terhadap DAU. Kenaikan pendapatan bagi hasil (56,47

persen), juga dipengaruhi oleh bertambahnya perolehan pendapatan dari dana reboisasi (146,44 persen), royalti (55,34 persen), serta pajak bumi dan bangunan (43,65 persen). Sementara kenaikan DAK sebesar 16,58 persen, umumnya berupa alokasi anggaran non fisik seperti Bantuan Operasional Sekolah–BOS (64,24 persen).

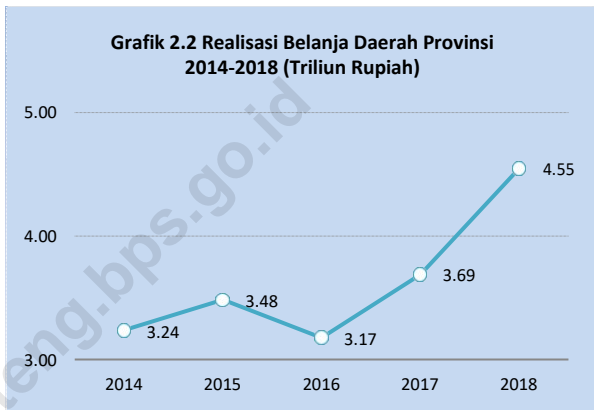
2.2 Realisasi Pengeluaran Pemerintah Daerah Provinsi

Tabel 2.2 Realisasi Belanja Daerah Provinsi (Ribu Rupiah), 2017-2018

Jenis Belanja	2017	2018	Perubahan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
A. BELANJA TIDAK LANGSUNG	2 166 595 949	2 374 895 508	9,61
1. Belanja Pegawai	1 115 423 441	1 168 696 271	4,78
2. Belanja Bunga	0	0	---
3. Belanja Subsidi	1 161 024	1 151 976	-0,78
4. Belanja Hibah	445 279 733	446 970 771	0,38
5. Belanja Bantuan Sosial	38 344 000	59 006 000	53,89
6. Belanja Bagi Hasil	556 674 084	665 060 565	19,47
7. Belanja Bantuan Keuangan	6 723 703	34 009 925	405,82
8. Belanja Tidak Terduga	2 989 964	0	---
B. BELANJA LANGSUNG	1 520 293 267	2 172 804 242	42,92
1. Belanja Pegawai	179 626 364	191 970 401	6,87
2. Belanja Barang dan Jasa	775 421 639	920 439 748	18,70
3. Belanja Modal	565 245 264	1 060 394 093	87,60
TOTAL BELANJA	3 686 889 216	4 547 699 750	23,35

Selama tahun 2014-2018, rata-rata realisasi pengeluaran untuk belanja daerah cukup tinggi yakni mencapai Rp3,63 triliun per tahun. Terdapat selisih hanya sekitar Rp0,11 triliun per tahun dibandingkan rata-

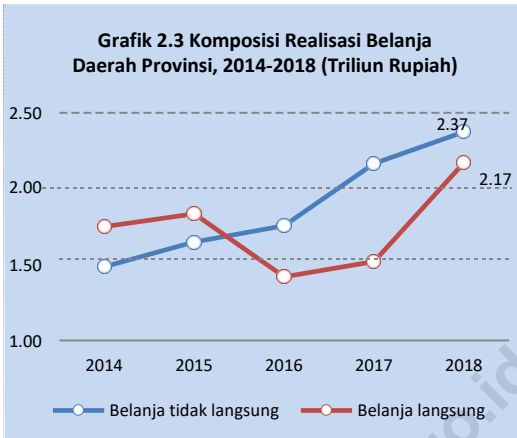
rata penerimaan daerah. Selama dua tahun terakhir, terjadi lonjakan realisasi kebutuhan belanja pemerintah daerah dari Rp3,69 triliun (2017) dan Rp4,55 triliun (2018), atau terjadi kenaikan 23,35 persen. Daya serap anggaran pada APBD tahun 2018 cukup tinggi karena selisih antara realisasi penerimaan dan belanja hanya sekitar Rp0,13 triliun. Realisasi anggaran belanja tahun 2018 terdiri dari alokasi belanja tidak langsung (Rp2,38 triliun) dan belanja langsung (Rp2,17 triliun). Dalam komponen belanja tidak langsung, porsi dominan berasal dari belanja pegawai (Rp1,17 triliun), belanja bagi hasil (Rp0,67 triliun), dan belanja hibah



(Rp0,45 triliun). Sedangkan dalam komponen belanja langsung berasal dari belanja modal (Rp1,06 triliun), belanja barang dan jasa (0,92 triliun), dan belanja pegawai (Rp0,19 triliun).

Dilihat dari perkembangannya, kenaikan realisasi belanja pemerintah daerah dipengaruhi oleh kenaikan belanja tidak langsung (9,61 persen) dan belanja langsung (42,92 persen). Selama tiga tahun terakhir, alokasi anggaran belanja tidak langsung relatif lebih tinggi dibandingkan belanja langsung. Kenaikan pada komponen belanja tidak langsung, dipengaruhi oleh bertambahnya realisasi pada belanja bantuan

keuangan (405,82 persen), belanja bantuan sosial (53,89 persen), belanja bagi hasil (19,47 persen), belanja pegawai (4,78 persen), dan belanja hibah



(0,38 persen). Sementara itu, kenaikan pada komponen belanja langsung, secara kolektif dipengaruhi oleh bertambahnya realisasi belanja modal (87,60 persen), belanja barang

dan jasa (18,70 persen), dan belanja pegawai (6,87 persen).

2.3 Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Secara keseluruhan, realisasi pendapatan pemerintah daerah kabupaten/kota selama tahun 2018 meningkat 2,96 persen, dari Rp15,49 triliun (2017) menjadi Rp15,95 triliun (2018). Peningkatan ini terutama dipengaruhi oleh kenaikan pada realisasi dana perimbangan sebesar 2,78 persen, dari Rp11,89 triliun (2017) menjadi Rp12,22 triliun (2018). Kenaikan realisasi pendapatan juga ditopang oleh meningkatnya lain-lain pendapatan yang sah sebesar 11,81 persen, dari Rp2,20 triliun (2017) menjadi Rp2,46 triliun (2018). Pada komponen dana perimbangan, kenaikan tertinggi terjadi pada dana yang diperoleh dari bagi hasil (15,40 persen), diikuti oleh DAK (7,24 persen) dan DAU (0,01 persen). Namun demikian, porsi terbesar dana perimbangan masih didominasi oleh

tingginya pendapatan dari DAU (70,32 persen). Sementara itu, realisasi PAD menurun sebesar 9,39 persen dari Rp1,40 triliun (2017) menjadi Rp1,27 triliun (2018). Penurunan ini dipengaruhi oleh merosotnya pendapatan dari pajak daerah (16,48 persen), lain-lain PAD yang sah (8,27 persen), dan retribusi daerah (0,01 persen). Pendapatan daerah dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan meningkat cukup tinggi (15,24 persen).

Tabel 2.3 Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten/Kota (Ribu Rupiah), 2017-2018

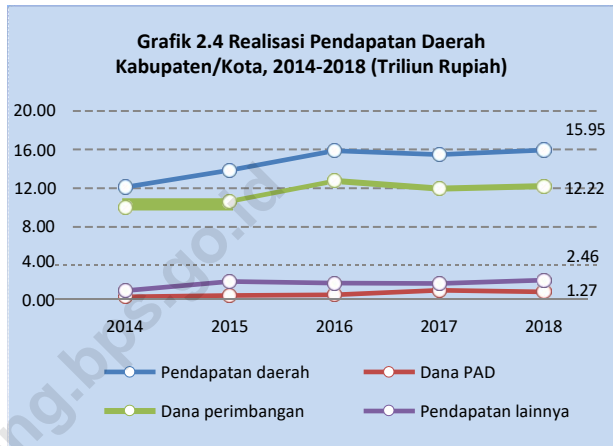
Jenis Pendapatan	2017	2018	Perubahan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
A. PENDAPATAN DAERAH	15 489 989 119	15 949 200 491	2,96
1. Pendapatan Asli Daerah	1 399 372 212	1 267 978 695	-9,39
1.1. Pajak Daerah	543 286 094	453 728 241	-16,48
1.2. Retribusi Daerah	89 320 761	89 311 602	-0,01
1.3. Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	91 912 686	105 921 785	15,24
1.4. Lain-lain PAD yang Sah	674 852 671	619 017 067	-8,27
2. Dana Perimbangan	11 887 081 692	12 217 540 441	2,78
2.1. Bagi Hasil Pajak	1 114 585 362	1 286 244 429	15,40
2.3. Dana Alokasi Umum	8 590 433 740	8 591 212 073	0,01
2.4. Dana Alokasi Khusus	2 182 062 590	2 340 083 939	7,24
3. Lain-lain Pendapatan yang Sah	2 203 535 215	2 463 681 355	11,81

Komponen dana perimbangan masih merupakan penopang utama dari pendapatan daerah kabupaten/kota. Sedikit terjadi penurunan dari 76,74 persen (2017) menjadi 76,60 persen (2018). Dana perimbangan

sebesar ini merupakan kontribusi dari perolehan DAK (70,32 persen), DAU (19,15 persen), dan bagi hasil pajak (10,53 persen).

Apabila dilihat dalam lima tahun terakhir, realisasi pendapatan daerah kabupaten/kota terjadi kenaikan selama 2014-2016, namun fluktuatif selama 2017-2018. Hal ini terlihat dari realisasi tahunan yang senilai Rp12,11

triliun (2014),
 Rp13,85 triliun
 (2015), RP15,89
 triliun (2016),
 Rp15,49 triliun
 (2017), dan
 Rp15,95 triliun
 (2018). Dilihat dari

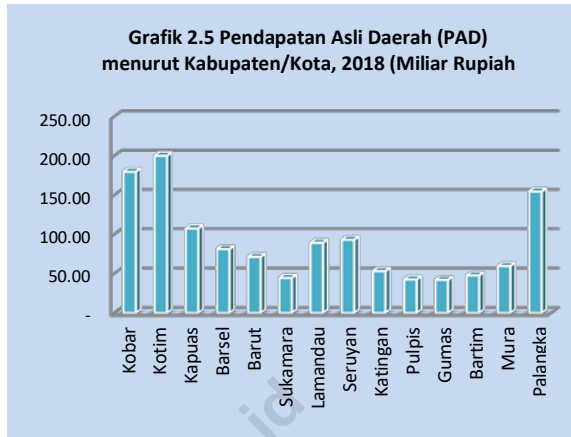


polanya, nilai pendapatan daerah sangat dipengaruhi oleh besarnya dana perimbangan setiap tahun, meliputi Rp10,00 triliun (2014), Rp10,65 triliun (2015), Rp12,75 triliun (2016), Rp11,95 triliun (2017), dan Rp12,22 triliun (2018).

Selama tahun 2018, terdapat empat wilayah yang memiliki PAD di atas Rp100,00 miliar yakni Kotawaringin Timur (Rp200,13 miliar), Kotawaringin Barat (Rp179,79 miliar), Palangka Raya (Rp154,64 miliar), dan Kapuas (Rp107,66 miliar). Sementara itu, terdapat lima wilayah yang memperoleh dana perimbangan di atas Rp1,00 triliun masing-masing Kapuas (Rp1,31 triliun), Kotawaringin Timur (Rp1,13 triliun), Katingan

(Rp1,01 triliun), dan Murung Raya (Rp1,01 triliun). Meskipun PAD Kabupaten

Kotawaringin Barat dan Kotawaringin Timur cukup tinggi, namun relatif masih diwarnai oleh tingginya kontribusi dana perimbangan dalam struktur APBD.



2.4 Realisasi Pengeluaran Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Sebagaimana halnya pada pendapatan pemerintah daerah provinsi, realisasi belanja pemerintah daerah kabupaten/kota juga mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya. Selama dua tahun terakhir terjadi kenaikan sebesar 2,08 persen dari Rp15,55 triliun (2017) menjadi Rp15,88 triliun (2018). Kenaikan belanja ini didorong oleh meningkatnya komponen belanja tidak langsung sebesar 5,38 persen dari Rp7,75 triliun (2017) menjadi Rp8,17 triliun (2018). Sedangkan komponen belanja langsung terjadi penurunan sebesar 1,19 persen dari Rp7,81 triliun (2017) menjadi Rp7,71 triliun (2018).

**Tabel 2.4 Realisasi Belanja Daerah Kabupaten/Kota (Ribu Rupiah),
2017-2018**

Jenis Belanja	2017	2018	Perubahan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
A. BELANJA TIDAK LANGSUNG	7 748 844 614	8 165 828 935	5,38
1. Belanja Pegawai	5 040 026 691	5 363 720 381	6,42
2. Belanja Bunga	20 374 634	4 487 031	-77,98
3. Belanja Subsidi	22 008 095	19 317 822	-12,22
4. Belanja Hibah	541 334 105	599 729 180	10,79
5. Belanja Bantuan Sosial	41 784 304	51 447 583	23,13
6. Belanja Bagi Hasil	45 165 908	36 399 193	-19,41
7. Belanja Bantuan Keuangan	2 030 299 273	2 084 048 981	2,65
8. Belanja Tidak Terduga	7 851 604	6 678 764	-14,94
B. BELANJA LANGSUNG	7 805 030 602	7 712 104 157	-1,19
1. Belanja Pegawai	748 708 109	868 627 520	16,02
2. Belanja Barang dan Jasa	3 033 136 767	3 168 889 713	4,48
3. Belanja Modal	4 023 185 726	3 674 586 924	-8,66
TOTAL BELANJA	15 553 875 216	15 877 933 092	2,08

Pada komponen belanja tidak langsung, alokasi belanja selama tahun 2018 sebagian besar digunakan untuk belanja pegawai (65,68 persen) dan belanja bantuan keuangan (25,52 persen). Terjadi kenaikan pada belanja bantuan sosial (23,13 persen), belanja hibah (10,79 persen), belanja pegawai (6,42 persen), dan belanja bantuan keuangan (2,65 persen). Komposisi realisasi belanja pada komponen belanja langsung diantaranya belanja modal (47,65 persen), belanja barang dan jasa (41,09 persen), dan belanja pegawai (11,26 persen). Dibandingkan tahun lalu, terjadi kenaikan realisasi pada belanja pegawai (16,02 persen) serta belanja barang dan jasa (4,48 persen).

Dari 14 belas kabupaten/kota, realisasi belanja pemerintah daerah yang cukup tinggi

selama tahun 2018

berasal dari

Kabupaten Kapuas

(Rp1,73 triliun) dan

Kotawaringin Timur

(Rp1,65 triliun).

Realisasi belanja di

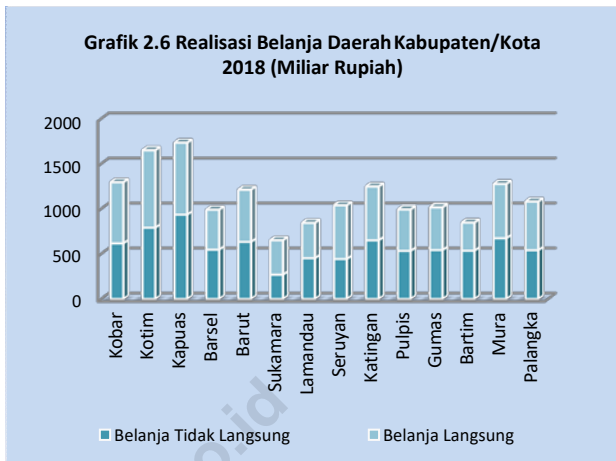
beberapa wilayah

berkisar antara Rp1,00 triliun hingga Rp1,30 triliun per tahun. Sementara

itu, realisasi anggaran belanja Kabupaten Barito Selatan, Sukamara,

Lamandau, Pulang Pisau, dan Barito Timur berada di bawah Rp1,00 triliun

per tahun.



berkisar antara Rp1,00 triliun hingga Rp1,30 triliun per tahun. Sementara

itu, realisasi anggaran belanja Kabupaten Barito Selatan, Sukamara,

Lamandau, Pulang Pisau, dan Barito Timur berada di bawah Rp1,00 triliun

per tahun.



LAMPIRAN

<https://kalteng.bps.go.id>

Lampiran 1. Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Ribu Rupiah), 2017-2018

Jenis Pendapatan	2017	2018
(1)	(2)	(3)
A. PENDAPATAN DAERAH	4 100 957 755	4 682 054 876
1. Pendapatan Asli Daerah	1 342 330 619	1 616 521 660
1.1. Pajak Daerah	1 091 749 859	1 354 700 324
1.2. Retribusi Daerah	11 521 594	12 549 086
1.3. Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	54 057 991	64 096 645
1.4. Lain-lain PAD yang Sah	185 001 175	185 175 605
2. Dana Perimbangan	2 590 877 895	2 907 967 886
2.1. Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	372 437 952	582 760 139
2.2. Dana Alokasi Umum	1 574 382 856	1 574 382 856
2.3. Dana Alokasi Khusus	644 057 087	750 824 891
3. Lain-lain Pendapatan yang Sah	167 749 241	157 565 330

Lampiran 2. Realisasi Belanja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Ribu Rupiah), 2017-2018

Jenis Belanja	2017	2018
(1)	(2)	(3)
A. BELANJA TIDAK LANGSUNG	2 166 595 949	2 374 895 508
1. Belanja Pegawai	1 115 423 441	1 168 696 271
2. Belanja Bunga	0	0
3. Belanja Subsidi	1 161 024	1 151 976
4. Belanja Hibah	445 279 733	446 970 771
5. Belanja Bantuan Sosial	38 344 000	59 006 000
6. Belanja Bagi Hasil	556 674 084	665 060 565
7. Belanja Bantuan Keuangan	6 723 703	34 009 925
8. Belanja Tidak Terduga	2 989 964	0
B. BELANJA LANGSUNG	1 520 293 267	2 172 804 242
1. Belanja Pegawai	179 626 364	191 970 401
2. Belanja Barang dan Jasa	775 421 639	920 439 748
3. Belanja Modal	565 245 264	1 060 394 093
TOTAL BELANJA	3 686 889 216	4 547 699 750

Lampiran 3. Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Seluruh Provinsi Kalimantan Tengah (Ribu Rupiah), 2017-2018

Jenis Pendapatan	2017	2018
(1)	(2)	(3)
A. PENDAPATAN DAERAH	15 489 989 119	15 949 200 491
1. Pendapatan Asli Daerah	1 399 372 212	1 267 978 695
1.1. Pajak Daerah	543 286 094	453 728 241
1.2. Retribusi Daerah	89 320 761	89 311 602
1.3. Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	91 912 686	105 921 785
1.4. Lain-lain PAD yang Sah	674 852 671	619 017 067
2. Dana Perimbangan	11 887 081 692	12 217 540 441
2.1. Bagi Hasil Pajak	1 114 585 362	1 286 244 429
2.3. Dana Alokasi Umum	8 590 433 740	8 591 212 073
2.4. Dana Alokasi Khusus	2 182 062 590	2 340 083 939
3. Lain-lain Pendapatan yang Sah	2 203 535 215	2 463 681 355

Lampiran 4. Realisasi Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Seluruh Provinsi Kalimantan Tengah (Ribu Rupiah), 2017-2018

Jenis Belanja	2017	2018
(1)	(2)	(3)
A. BELANJA TIDAK LANGSUNG	7 748 844 614	8 165 828 935
1. Belanja Pegawai	5 040 026 691	5 363 720 381
2. Belanja Bunga	20 374 634	4 487 031
3. Belanja Subsidi	22 008 095	19 317 822
4. Belanja Hibah	541 334 105	599 729 180
5. Belanja Bantuan Sosial	41 784 304	51 447 583
6. Belanja Bagi Hasil	45 165 908	36 399 193
7. Belanja Bantuan Keuangan	2 030 299 273	2 084 048 981
8. Belanja Tidak Terduga	7 851 604	6 678 764
B. BELANJA LANGSUNG	7 805 030 602	7 712 104 157
1. Belanja Pegawai	748 708 109	868 627 520
2. Belanja Barang dan Jasa	3 033 136 767	3 168 889 713
3. Belanja Modal	4 023 185 726	3 674 586 924
TOTAL BELANJA	15 553 875 216	15 877 933 092

Lampiran 5. Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Ribu Rupiah), 2017-2018

Jenis Pendapatan	2017	2018
(1)	(2)	(3)
A. PENDAPATAN DAERAH	1 317 262 615	1 291 455 998
1. Pendapatan Asli Daerah	176 855 125	179 785 921
1.1. Pajak Daerah	48 280 750	61 675 813
1.2. Retribusi Daerah	12 424 400	11 425 819
1.3. Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	8 110 575	9 017 096
1.4. Lain-lain PAD yang Sah	108 039 400	97 667 193
2. Dana Perimbangan	938 379 875	913 940 905
2.1. Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	56 433 629	91 442 583
2.2. Dana Alokasi Umum	652 906 913	652 906 913
2.3. Dana Alokasi Khusus	229 039 333	169 591 409
3. Lain-lain Pendapatan yang Sah	202 027 615	197 729 172

Lampiran 6. Realisasi Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Ribu Rupiah), 2017-2018

Jenis Belanja	2017	2018
(1)	(2)	(3)
A. BELANJA TIDAK LANGSUNG	571 736 985	617 237 997
1. Belanja Pegawai	402 416 579	434 453 992
2. Belanja Bunga	0	0
3. Belanja Subsidi	0	0
4. Belanja Hibah	22 678 515	34 088 746
5. Belanja Bantuan Sosial	1 517 250	1 630 250
6. Belanja Bagi Hasil	6 859 968	8 174 154
7. Belanja Bantuan Keuangan	138 256 387	138 890 855
8. Belanja Tidak Terduga	8 286	0
B. BELANJA LANGSUNG	719 644 222	678 231 784
1. Belanja Pegawai	56 157 757	84 296 327
2. Belanja Barang dan Jasa	260 165 348	253 176 675
3. Belanja Modal	403 321 117	340 758 782
TOTAL BELANJA	1 291 381 207	1 295 469 781

Lampiran 7. Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Ribu Rupiah), 2017-2018

Jenis Pendapatan	2017	2018
(1)	(2)	(3)
A. PENDAPATAN DAERAH	1 579 048 584	1 646 751 377
1. Pendapatan Asli Daerah	245 980 100	200 129 417
1.1. Pajak Daerah	73 380 787	71 504 271
1.2. Retribusi Daerah	10 337 830	13 108 956
1.3. Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7 220 338	8 134 426
1.4. Lain-lain PAD yang Sah	155 041 145	107 381 764
2. Dana Perimbangan	1 101 878 063	1 133 632 013
2.1. Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	83 458 818	114 547 516
2.2. Dana Alokasi Umum	820 559 562	820 491 554
2.3. Dana Alokasi Khusus	197 859 683	198 592 943
3. Lain-lain Pendapatan yang Sah	231 190 421	312 989 947

Lampiran 8. Realisasi Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Ribu Rupiah), 2017-2018

Jenis Belanja	2017	2018
(1)	(2)	(3)
A. BELANJA TIDAK LANGSUNG	794 010 574	790 919 068
1. Belanja Pegawai	518 810 699	536 092 983
2. Belanja Bunga	0	0
3. Belanja Subsidi	0	0
4. Belanja Hibah	39 678 832	25 284 137
5. Belanja Bantuan Sosial	1 334 019	432 116
6. Belanja Bagi Hasil	5 564 687	7 019 749
7. Belanja Bantuan Keuangan	227 713 952	221 301 447
8. Belanja Tidak Terduga	908 385	788 636
B. BELANJA LANGSUNG	718 900 885	859 281 457
1. Belanja Pegawai	22 099 732	29 149 068
2. Belanja Barang dan Jasa	440 715 557	485 925 919
3. Belanja Modal	256 085 596	344 206 470
TOTAL BELANJA	1 512 911 459	1 650 200 525

Lampiran 9. Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas (Ribu Rupiah), 2017-2018

Jenis Pendapatan	2017	2018
(1)	(2)	(3)
A. PENDAPATAN DAERAH	1 724 704 302	1 693 319 412
1. Pendapatan Asli Daerah	93 717 860	107 659 736
1.1. Pajak Daerah	19 248 376	26 111 247
1.2. Retribusi Daerah	5 823 322	5 423 357
1.3. Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5 525 774	6 976 114
1.4. Lain-lain PAD yang Sah	63 120 388	69 149 018
2. Dana Perimbangan	1 339 890 875	1 309 754 560
2.1. Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	198 946 709	172 184 016
2.2. Dana Alokasi Umum	866 321 730	866 110 470
2.3. Dana Alokasi Khusus	274 622 436	271 460 074
3. Lain-lain Pendapatan yang Sah	291 095 567	275 905 116

Lampiran 10. Realisasi Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas (Ribu Rupiah), 2017-2018

Jenis Belanja	2017	2018
(1)	(2)	(3)
A. BELANJA TIDAK LANGSUNG	906 860 658	935 808 612
1. Belanja Pegawai	600 166 117	602 682 839
2. Belanja Bunga	3 258 764	3 013 310
3. Belanja Subsidi	0	0
4. Belanja Hibah	17 556 579	55 617 033
5. Belanja Bantuan Sosial	7 521 778	6 730 469
6. Belanja Bagi Hasil	2 084 080	2 335 000
7. Belanja Bantuan Keuangan	271 231 650	264 795 631
8. Belanja Tidak Terduga	5 041 690	634 330
B. BELANJA LANGSUNG	862 590 506	798 067 153
1. Belanja Pegawai	70 604 591	91 018 664
2. Belanja Barang dan Jasa	324 881 937	281 480 942
3. Belanja Modal	467 103 978	425 567 547
TOTAL BELANJA	1 769 451 164	1 733 875 765

Lampiran 11. Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan (Ribu Rupiah), 2017-2018

Jenis Pendapatan	2017	2018
(1)	(2)	(3)
A. PENDAPATAN DAERAH	931 583 634	993 055 939
1. Pendapatan Asli Daerah	49 297 480	81 427 861
1.1. Pajak Daerah	7 115 682	11 130 151
1.2. Retribusi Daerah	4 577 254	4 914 888
1.3. Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7 091 751	8 925 716
1.4. Lain-lain PAD yang Sah	30 512 793	56 457 106
2. Dana Perimbangan	769 484 748	810 947 109
2.1. Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	43 989 141	73 935 578
2.2. Dana Alokasi Umum	576 041 341	576 041 341
2.3. Dana Alokasi Khusus	149 454 266	160 970 190
3. Lain-lain Pendapatan yang Sah	112 801 406	100 680 969

Lampiran 12. Realisasi Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan (Ribu Rupiah), 2017-2018

Jenis Belanja	2017	2018
(1)	(2)	(3)
A. BELANJA TIDAK LANGSUNG	511 770 871	547 029 474
1. Belanja Pegawai	342 891 625	398 623 809
2. Belanja Bunga	0	12 421
3. Belanja Subsidi	1 000 000	0
4. Belanja Hibah	26 505 257	11 148 984
5. Belanja Bantuan Sosial	7 360 122	2 485 000
6. Belanja Bagi Hasil	529 246	1 232 358
7. Belanja Bantuan Keuangan	133 219 716	133 435 702
8. Belanja Tidak Terduga	264 905	91 200
B. BELANJA LANGSUNG	400 874 909	443 002 748
1. Belanja Pegawai	48 684 419	33 723 944
2. Belanja Barang dan Jasa	218 573 706	204 919 694
3. Belanja Modal	133 616 784	204 359 110
TOTAL BELANJA	912 645 780	990 032 222

Lampiran 13. Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Utara (Ribu Rupiah), 2017-2018

Jenis Pendapatan	2017	2018
(1)	(2)	(3)
A. PENDAPATAN DAERAH	1 075 758 067	1 125 837 634
1. Pendapatan Asli Daerah	64 810 020	71 442 644
1.1. Pajak Daerah	8 550 869	12 059 726
1.2. Retribusi Daerah	4 208 653	7 540 623
1.3. Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7 906 774	8 650 608
1.4. Lain-lain PAD yang Sah	44 143 724	43 191 687
2. Dana Perimbangan	804 344 613	802 790 452
2.1. Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	147 228 406	162 925 686
2.2. Dana Alokasi Umum	559 665 616	559 665 616
2.3. Dana Alokasi Khusus	97 450 591	80 199 150
3. Lain-lain Pendapatan yang Sah	206 603 434	251 604 538

**Lampiran 14. Realisasi Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Utara
(Ribu Rupiah), 2017-2018**

Jenis Belanja	2017	2018
(1)	(2)	(3)
A. BELANJA TIDAK LANGSUNG	537 972 659	633 413 652
1. Belanja Pegawai	364 037 909	417 726 098
2. Belanja Bunga	0	0
3. Belanja Subsidi	0	0
4. Belanja Hibah	43 422 539	63 114 786
5. Belanja Bantuan Sosial	1 487 840	1 222 035
6. Belanja Bagi Hasil	1 314 825	2 915 710
7. Belanja Bantuan Keuangan	127 345 546	148 318 923
8. Belanja Tidak Terduga	364 000	116 100
B. BELANJA LANGSUNG	614 884 551	578 756 248
1. Belanja Pegawai	37 172 780	68 046 049
2. Belanja Barang dan Jasa	197 898 771	225 451 350
3. Belanja Modal	379 813 000	285 258 849
TOTAL BELANJA	1 152 857 210	1 212 169 900

Lampiran 15. Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukamara (Ribu Rupiah), 2017-2018

Jenis Pendapatan	2017	2018
(1)	(2)	(3)
A. PENDAPATAN DAERAH	673 516 439	691 264 976
1. Pendapatan Asli Daerah	49 848 715	44 572 552
1.1. Pajak Daerah	16 690 027	6 323 191
1.2. Retribusi Daerah	11 001 619	2 269 783
1.3. Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	8 261 704	9 109 912
1.4. Lain-lain PAD yang Sah	13 895 365	26 869 666
2. Dana Perimbangan	569 190 667	584 779 325
2.1. Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	34 234 494	41 965 800
2.2. Dana Alokasi Umum	420 535 543	420 535 543
2.3. Dana Alokasi Khusus	114 420 630	122 277 982
3. Lain-lain Pendapatan yang Sah	54 477 057	61 913 099

**Lampiran 16. Realisasi Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Sukamara
(Ribu Rupiah), 2017-2018**

Jenis Belanja	2017	2018
(1)	(2)	(3)
A. BELANJA TIDAK LANGSUNG	249 528 304	268 806 973
1. Belanja Pegawai	158 335 304	163 203 687
2. Belanja Bunga	0	0
3. Belanja Subsidi	0	0
4. Belanja Hibah	15 472 809	29 299 744
5. Belanja Bantuan Sosial	285 000	150 000
6. Belanja Bagi Hasil	1 650 000	699 551
7. Belanja Bantuan Keuangan	73 785 191	74 795 740
8. Belanja Tidak Terduga	0	658 251
B. BELANJA LANGSUNG	422 489 195	382 713 277
1. Belanja Pegawai	46 120 538	50 470 374
2. Belanja Barang dan Jasa	123 211 258	112 292 813
3. Belanja Modal	253 157 399	219 950 090
TOTAL BELANJA	672 017 499	651 520 250

Lampiran 17. Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau (Ribu Rupiah), 2017-2018

Jenis Pendapatan	2017	2018
(1)	(2)	(3)
A. PENDAPATAN DAERAH	864 429 128	838 439 195
1. Pendapatan Asli Daerah	162 481 919	89 396 746
1.1. Pajak Daerah	118 770 579	60 948 829
1.2. Retribusi Daerah	2 338 248	2 416 140
1.3. Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6 505 429	7 365 734
1.4. Lain-lain PAD yang Sah	34 867 663	18 666 043
2. Dana Perimbangan	602 806 290	617 028 337
2.1. Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	44 812 664	58 947 079
2.2. Dana Alokasi Umum	462 248 605	462 248 605
2.3. Dana Alokasi Khusus	95 745 021	95 832 653
3. Lain-lain Pendapatan yang Sah	99 140 919	132 014 112

**Lampiran 18. Realisasi Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau
(Ribu Rupiah), 2017-2018**

Jenis Belanja	2017	2018
(1)	(2)	(3)
A. BELANJA TIDAK LANGSUNG	426 313 759	452 113 274
1. Belanja Pegawai	248 815 126	259 215 818
2. Belanja Bunga	0	0
3. Belanja Subsidi	0	0
4. Belanja Hibah	41 367 365	64 812 344
5. Belanja Bantuan Sosial	1 238 631	1 246 545
6. Belanja Bagi Hasil	11 690 891	5 223 462
7. Belanja Bantuan Keuangan	123 201 746	121 615 105
8. Belanja Tidak Terduga	0	0
B. BELANJA LANGSUNG	469 452 916	391 554 338
1. Belanja Pegawai	58 346 940	58 780 524
2. Belanja Barang dan Jasa	177 572 197	191 842 791
3. Belanja Modal	233 533 779	140 931 023
TOTAL BELANJA	895 766 675	843 667 612

**Lampiran 19. Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Seruyan
(Ribu Rupiah), 2017-2018**

Jenis Pendapatan	2017	2018
(1)	(2)	(3)
A. PENDAPATAN DAERAH	1 100 045 653	1 126 581 198
1. Pendapatan Asli Daerah	110 713 321	93 253 508
1.1. Pajak Daerah	60 038 441	46 849 541
1.2. Retribusi Daerah	10 212 959	16 457 595
1.3. Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6 535 825	7 529 299
1.4. Lain-lain PAD yang Sah	33 926 096	22 417 073
2. Dana Perimbangan	863 833 765	886 362 459
2.1. Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	109 962 951	83 370 757
2.2. Dana Alokasi Umum	616 493 956	616 416 406
2.3. Dana Alokasi Khusus	137 376 858	186 575 296
3. Lain-lain Pendapatan yang Sah	125 498 567	146 965 231

**Lampiran 20. Realisasi Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Seruyan
(Ribu Rupiah), 2017-2018**

Jenis Belanja	2017	2018
(1)	(2)	(3)
A. BELANJA TIDAK LANGSUNG	470 148 605	443 575 674
1. Belanja Pegawai	247 371 740	253 686 731
2. Belanja Bunga	15 636 330	0
3. Belanja Subsidi	0	0
4. Belanja Hibah	55 695 847	29 929 623
5. Belanja Bantuan Sosial	226 331	296 622
6. Belanja Bagi Hasil	5 794 821	4 673 140
7. Belanja Bantuan Keuangan	145 423 536	154 989 558
8. Belanja Tidak Terduga	0	0
B. BELANJA LANGSUNG	577 495 382	595 872 598
1. Belanja Pegawai	71 793 361	78 020 821
2. Belanja Barang dan Jasa	184 440 927	203 038 387
3. Belanja Modal	321 261 094	314 813 390
TOTAL BELANJA	1 047 643 987	1 039 448 272

Lampiran 21. Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan (Ribu Rupiah), 2017-2018

Jenis Pendapatan	2017	2018
(1)	(2)	(3)
A. PENDAPATAN DAERAH	1 162 607 295	1 260 733 018
1. Pendapatan Asli Daerah	52 990 318	53 291 968
1.1. Pajak Daerah	24 244 009	13 601 097
1.2. Retribusi Daerah	2 981 559	3 645 828
1.3. Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5 749 484	7 247 304
1.4. Lain-lain PAD yang Sah	20 015 266	28 797 739
2. Dana Perimbangan	920 151 107	1 007 006 624
2.1. Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	65 591 541	102 810 253
2.2. Dana Alokasi Umum	696 300 554	695 606 221
2.3. Dana Alokasi Khusus	158 259 012	208 590 150
3. Lain-lain Pendapatan yang Sah	189 465 870	200 434 426

**Lampiran 22. Realisasi Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan
(Ribu Rupiah), 2017-2018**

Jenis Belanja	2017	2018
(1)	(2)	(3)
A. BELANJA TIDAK LANGSUNG	574 257 220	650 931 758
1. Belanja Pegawai	336 760 300	397 957 717
2. Belanja Bunga	0	0
3. Belanja Subsidi	1 194 609	1 323 387
4. Belanja Hibah	26 453 800	41 343 707
5. Belanja Bantuan Sosial	6 334 936	5 859 116
6. Belanja Bagi Hasil	1 486 918	2 675 177
7. Belanja Bantuan Keuangan	201 733 261	201 772 654
8. Belanja Tidak Terduga	293 396	0
B. BELANJA LANGSUNG	605 569 057	596 870 277
1. Belanja Pegawai	45 845 079	46 758 366
2. Belanja Barang dan Jasa	196 768 218	213 353 133
3. Belanja Modal	362 955 760	336 758 778
TOTAL BELANJA	1 179 826 277	1 247 802 035

Lampiran 23. Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Pulang Pisau (Ribu Rupiah), 2017-2018

Jenis Pendapatan	2017	2018
(1)	(2)	(3)
A. PENDAPATAN DAERAH	954 037 769	1 032 544 493
1. Pendapatan Asli Daerah	36 201 584	42 610 562
1.1. Pajak Daerah	9 443 029	12 937 403
1.2. Retribusi Daerah	5 181 753	4 026 426
1.3. Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4 382 689	5 328 289
1.4. Lain-lain PAD yang Sah	17 194 113	20 318 444
2. Dana Perimbangan	747 346 667	820 748 989
2.1. Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	31 437 740	44 500 139
2.2. Dana Alokasi Umum	568 390 382	568 390 382
2.3. Dana Alokasi Khusus	147 518 545	207 858 468
3. Lain-lain Pendapatan yang Sah	170 489 518	169 184 942

Lampiran 24. Realisasi Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Pulang Pisau (Ribu Rupiah), 2017-2018

Jenis Belanja	2017	2018
(1)	(2)	(3)
A. BELANJA TIDAK LANGSUNG	488 904 815	533 486 394
1. Belanja Pegawai	307 059 019	331 593 816
2. Belanja Bunga	0	0
3. Belanja Subsidi	0	0
4. Belanja Hibah	65 981 732	60 065 699
5. Belanja Bantuan Sosial	0	310 000
6. Belanja Bagi Hasil	638 900	638 900
7. Belanja Bantuan Keuangan	114 597 164	140 153 061
8. Belanja Tidak Terduga	628 000	724 918
B. BELANJA LANGSUNG	485 582 872	459 765 038
1. Belanja Pegawai	19 497 905	26 482 629
2. Belanja Barang dan Jasa	155 898 210	178 622 570
3. Belanja Modal	310 186 757	254 659 839
TOTAL BELANJA	974 487 687	993 251 432

Lampiran 25. Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas (Ribu Rupiah), 2017-2018

Jenis Pendapatan	2017	2018
(1)	(2)	(3)
A. PENDAPATAN DAERAH	1 036 075 768	998 904 299
1. Pendapatan Asli Daerah	36 509 690	42 147 371
1.1. Pajak Daerah	10 195 847	14 316 108
1.2. Retribusi Daerah	2 236 300	2 450 228
1.3. Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6 425 582	7 356 185
1.4. Lain-lain PAD yang Sah	17 651 961	18 024 850
2. Dana Perimbangan	863 775 455	802 822 785
2.1. Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	64 466 676	61 925 392
2.2. Dana Alokasi Umum	559 898 689	559 898 689
2.3. Dana Alokasi Khusus	239 410 090	180 998 704
3. Lain-lain Pendapatan yang Sah	135 790 623	153 934 143

Lampiran 26. Realisasi Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas (Ribu Rupiah), 2017-2018

Jenis Belanja	2017	2018
(1)	(2)	(3)
A. BELANJA TIDAK LANGSUNG	535 652 247	542 455 927
1. Belanja Pegawai	335 493 536	331 096 059
2. Belanja Bunga	0	0
3. Belanja Subsidi	0	0
4. Belanja Hibah	45 861 419	55 630 977
5. Belanja Bantuan Sosial	595 766	1 890 926
6. Belanja Bagi Hasil	0	0
7. Belanja Bantuan Keuangan	153 473 190	153 739 465
8. Belanja Tidak Terduga	228 336	98 500
B. BELANJA LANGSUNG	532 707 167	474 166 868
1. Belanja Pegawai	42 332 947	51 883 196
2. Belanja Barang dan Jasa	176 506 556	169 932 120
3. Belanja Modal	313 867 664	252 351 552
TOTAL BELANJA	1 068 359 414	1 016 622 795

Lampiran 27. Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Timur (Ribu Rupiah), 2017-2018

Jenis Pendapatan	2017	2018
(1)	(2)	(3)
A. PENDAPATAN DAERAH	815 348 404	868 518 373
1. Pendapatan Asli Daerah	100 370 174	47 823 933
1.1. Pajak Daerah	51 907 816	11 350 423
1.2. Retribusi Daerah	2 448 459	2 060 492
1.3. Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	8 638 910	8 635 182
1.4. Lain-lain PAD yang Sah	37 374 989	25 777 836
2. Dana Perimbangan	609 128 868	673 685 664
2.1. Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	53 023 606	76 114 769
2.2. Dana Alokasi Umum	477 145 707	478 975 191
2.3. Dana Alokasi Khusus	78 959 555	118 595 704
3. Lain-lain Pendapatan yang Sah	105 849 362	147 008 776

Lampiran 28. Realisasi Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Timur (Ribu Rupiah), 2017-2018

Jenis Belanja	2017	2018
(1)	(2)	(3)
A. BELANJA TIDAK LANGSUNG	531 974 488	535 284 146
1. Belanja Pegawai	347 047 370	342 452 775
2. Belanja Bunga	0	0
3. Belanja Subsidi	450 000	450 000
4. Belanja Hibah	38 016 687	49 864 781
5. Belanja Bantuan Sosial	383 523	889 520
6. Belanja Bagi Hasil	6 755 522	0
7. Belanja Bantuan Keuangan	139 321 386	141 627 070
8. Belanja Tidak Terduga	0	0
B. BELANJA LANGSUNG	320 824 331	311 702 384
1. Belanja Pegawai	64 988 138	71 730 680
2. Belanja Barang dan Jasa	128 277 987	147 690 520
3. Belanja Modal	127 558 206	92 281 184
TOTAL BELANJA	852 798 819	846 986 530

Lampiran 29. Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Murung Raya (Ribu Rupiah), 2017-2018

Jenis Pendapatan	2017	2018
(1)	(2)	(3)
A. PENDAPATAN DAERAH	1 161 799 195	1 229 015 938
1. Pendapatan Asli Daerah	68 670 823	59 797 986
1.1. Pajak Daerah	7 453 988	10 219 585
1.2. Retribusi Daerah	2 810 489	1 456 424
1.3. Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6 127 671	7 157 663
1.4. Lain-lain PAD yang Sah	52 278 675	40 964 314
2. Dana Perimbangan	959 263 098	1 006 451 743
2.1. Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	137 497 339	149 919 908
2.2. Dana Alokasi Umum	667 654 598	667 654 598
2.3. Dana Alokasi Khusus	154 111 161	188 877 237
3. Lain-lain Pendapatan yang Sah	133 865 274	162 766 209

Lampiran 30. Realisasi Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Murung Raya (Ribu Rupiah), 2017-2018

Jenis Belanja	2017	2018
(1)	(2)	(3)
A. BELANJA TIDAK LANGSUNG	622 495 133	673 760 073
1. Belanja Pegawai	346 272 142	407 625 079
2. Belanja Bunga	0	0
3. Belanja Subsidi	19 363 486	17 544 435
4. Belanja Hibah	69 258 894	41 751 953
5. Belanja Bantuan Sosial	6 780 832	18 268 663
6. Belanja Bagi Hasil	796 050	811 992
7. Belanja Bantuan Keuangan	179 948 729	187 660 951
8. Belanja Tidak Terduga	75 000	97 000
B. BELANJA LANGSUNG	499 966 451	602 177 520
1. Belanja Pegawai	86 036 009	95 514 860
2. Belanja Barang dan Jasa	194 091 108	276 262 196
3. Belanja Modal	219 839 334	230 400 464
TOTAL BELANJA	1 122 461 584	1 275 937 593

Lampiran 31. Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya (Ribu Rupiah), 2017-2018

Jenis Pendapatan	2017	2018
(1)	(2)	(3)
A. PENDAPATAN DAERAH	1 093 772 266	1 152 778 641
1. Pendapatan Asli Daerah	150 925 083	154 638 490
1.1. Pajak Daerah	87 965 894	94 700 856
1.2. Retribusi Daerah	12 737 916	12 115 043
1.3. Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3 430 180	4 488 257
1.4. Lain-lain PAD yang Sah	46 791 093	43 334 334
2. Dana Perimbangan	797 607 601	847 589 476
2.1. Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	43 501 648	51 654 953
2.2. Dana Alokasi Umum	646 270 544	646 270 544
2.3. Dana Alokasi Khusus	107 835 409	149 663 979
3. Lain-lain Pendapatan yang Sah	145 239 582	150 550 675

**Lampiran 32. Realisasi Belanja Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya
(Ribu Rupiah), 2017-2018**

Jenis Belanja	2017	2018
(1)	(2)	(3)
A. BELANJA TIDAK LANGSUNG	527 218 296	541 005 913
1. Belanja Pegawai	484 549 225	487 308 978
2. Belanja Bunga	1 479 540	1 461 300
3. Belanja Subsidi	0	0
4. Belanja Hibah	33 383 830	37 776 666
5. Belanja Bantuan Sosial	6 718 276	10 036 321
6. Belanja Bagi Hasil	0	0
7. Belanja Bantuan Keuangan	1 047 819	952 819
8. Belanja Tidak Terduga	39 606	3 469 829
B. BELANJA LANGSUNG	574 048 158	539 942 467
1. Belanja Pegawai	79 027 913	82 752 018
2. Belanja Barang dan Jasa	254 134 987	224 900 603
3. Belanja Modal	240 885 258	232 289 846
TOTAL BELANJA	1 101 266 454	1 080 948 380

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Jl. Kapten Piere Tendean No. 06, Palangka Raya, 73112
Telp. (0536) 3228105, Fax (0536) 3221380

Homepage: <http://kalteng.bps.go.id>, E-mail: bps6200@bps.go.id

